



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## MEMPERBAIKI TATA KELOLA DANA PENSIUN

**Lisnawati**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[lisnawati@dpr.go.id](mailto:lisnawati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Selama tahun 2023 dan awal tahun 2024, dana pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap diberitakan bermasalah. Diduga, ada puluhan Dapen dengan rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100%. Secara sederhana, RKD ini dipakai untuk mengukur kemampuan Dapen membayar kewajibannya ketika seluruh peserta, pensiun secara bersamaan.

Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa sebanyak 70% dari 48 Dapen pelat merah bermasalah. Perolehan imbal hasil yang minim membuka tabir tentang permasalahan akut di Dapen BUMN. Hal tersebut menjadi pintu masuk untuk melihat mismanajemen dalam pengelolaan Dapen, antara lain: *pertama*, pengelolaan investasi. Investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan berpotensi merugikan Dapen. *Kedua*, skema yang sudah tidak relevan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun. *Ketiga*, sumber daya manusia. Kepengurusan yang tidak kompeten, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan pengelola Dapen.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, kekurangan dana 22 Dapen BUMN ini sedang dihitung Kementerian BUMN bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelusuran awal menemukan total kekurangan dana berkisar antara Rp7-15 triliun, dengan perkiraan akhir sekitar Rp12-13 triliun. Kekurangan dana tersebut tidak terlepas dari karakteristik Dapen BUMN yang mengusung program manfaat pasti. Temuan lanjutan mengungkap bahwa 16 Dapen BUMN hanya mampu mencetak imbal hasil investasi di bawah 6%. Hasil ini bahkan di bawah rata-rata imbal hasil surat berharga negara (SBN).

Dugaan korupsi di PT TASPEN mulai tercium pada awal tahun 2024 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan mengenai penyimpangan dalam pengelolaan investasi dana pensiun. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, KPK menemukan indikasi kuat adanya investasi fiktif dalam bentuk pembelian surat utang jangka menengah atau *medium term note* (MTN) yang tidak sesuai dengan prosedur dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Pada Maret 2024, KPK secara resmi meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan mantan Direktur Utama PT TASPEN, Antonius Kosasih, sebagai tersangka. KPK menduga Antonius telah menyalahgunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan investasi yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Nilai investasi yang ditelisik KPK mencapai Rp1 triliun dan diduga terjadi pada tahun 2019. Kerugian negara dalam kasus ini juga tergolong fantastis karena diduga mencapai ratusan miliar Rupiah. Dugaan tersebut masih awal dan bisa bertambah. Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta yang terlibat dalam investasi fiktif tersebut ke rekening pribadi Antonius. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang sistematis di tubuh PT TASPEN.

## Atensi DPR

Skandal korupsi di PT TASPEN menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Dapen BUMN di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat terjadi di mana saja, termasuk di lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan negara. Penting bagi seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Pemerintah juga harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan investasi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu melakukan pengawasan kinerja BUMN penerima Dapen secara berkala, sehingga penyimpangan pengelolaan Dapen dapat diantisipasi sejak awal.

### Sumber

Kompas.id, 20 Juni 2024;  
medcom.id, 20 Juni 2024;  
msn.com, 20 Juni 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

### EDITOR

#### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

#### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

#### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

 @pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024